



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PER-16 /MBU/10/2014**

**TENTANG**

**KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

7. Peraturan.../2/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3695/M.PANRB/10/2014 Tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

**Pasal 1**

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Perubahan terhadap persediaan pegawai sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, ditetapkan dengan keputusan pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian atas nama atasan langsung.

Pasal 3.../3/2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2014

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**t t d.**

**DAHLAN ISKAN**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 November 2014

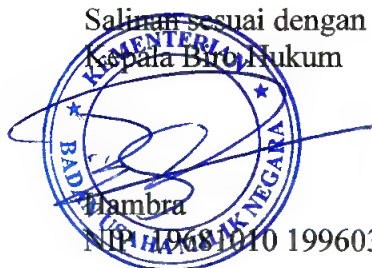
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**t t d.**

**YASONNA H. LAOLY**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1765

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



NIP. 19681010 199603 1 001



Lampiran I (1/1)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI  
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
<i>I</i>	2	3
1.	17	5
2.	16	2
3.	15	15
4.	14	0
5.	13	0
6.	12	41
7.	11	2
8.	10	0
9.	9	75
10.	8	9
11.	7	76
12.	6	8
13.	5	62
14.	4	0
15.	3	0
16.	2	0
17.	1	0
Total		295

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



Hambra  
NIP. 19681010 199603 1 001



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN	17	1	
2.	Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi	15	1	
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	0	
4.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
5.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	9	1	
6.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	12	1	
7.	Kepala Subbagian Layanan SDM	9	1	
8.	Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Manajemen Jabatan Fungsional	9	0	
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	12	1	
10.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	0	
11.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	9	0	
12.	Kepala Biro Hukum	15	1	
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	12	1	
14.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	9	1	
15.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	9	0	
16.	Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	9	1	
17.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum I	12	1	
18.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia	9	1	
19.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib	9	1	
20.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum II	12	1	

A



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
21.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ila	9	1	
22.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Iib	9	1	
23.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	12	1	
24.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I	9	1	
25.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II	9	1	
26.	Kepala Biro Umum	15	1	
27.	Kepala Bagian Administrasi	12	1	
28.	Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip	9	1	
29.	Kepala Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi	9	1	
30.	Kepala Subbagian TU Pimpinan	8	7	
31.	Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan	12	1	
32.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengelola Barang Milik Negara	9	0	
33.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	8	1	
34.	Kepala Subbagian Pengadaan	9	0	
35.	Inspektur	15	1	
36.	Kepala Sub Bagian TU	8	1	
37.	DEPUTI BIDANG USAHA AGRO DAN INDUSTRI STRATEGIS	17	1	
38.	Asdep Usaha Perkebunan dan Kehutanan	15	1	
39.	Kepala Bidang Usaha Perkebunan I	12	1	
40.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ia	9	1	

*Handwritten signature*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
41.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ib	9	1	
42.	Kepala Bidang Usaha Perkebunan II	12	1	
43.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ila	9	1	
44.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Iib	9	0	
45.	Kepala Bidang Usaha Kehutanan	12	1	
46.	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ia	9	1	
47.	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ib	9	1	
48.	Asdep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri	15	0	
49.	Kepala Bidang Usaha Pertanian dan Perikanan	12	1	
50.	Kepala Subbidang Usaha Pertanian	9	1	
51.	Kepala Subbidang Usaha Perikanan	9	1	
52.	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri I	12	1	
53.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ia	9	1	
54.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ib	9	1	
55.	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri II	12	1	
56.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ila	9	1	
57.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Iib	9	0	
58.	Asdep Usaha Industri Strategis	15	1	
59.	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis I	12	1	
60.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ia	9	1	
61.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ib	9	1	
62.	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis II	12	1	
63.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ila	9	1	

1/5



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II (4/8)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
64.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIb	9	0	
65.	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis III	12	1	
66.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIa	9	1	
67.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIb	9	1	
68.	DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, DAN PERHUBUNGAN	17	1	
69.	Asdep Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata	15	1	
70.	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan I	12	1	
71.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ia	9	1	
72.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ib	9	1	
73.	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan II	12	1	
74.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Iia	9	1	
75.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Iib	9	1	
76.	Kepala Bidang Usaha Percetakan dan Pariwisata	12	1	
77.	Kepala Subbidang Usaha Percetakan	9	1	
78.	Kepala Subbidang Usaha Pariwisata dan Perhotelan	9	1	
79.	Asdep Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri	15	1	
80.	Kepala Bidang Usaha Perdagangan	12	1	
81.	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan I	9	1	
82.	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan II	9	0	
83.	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri I	12	1	
84.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ia	9	1	

15





Lampiran II (5/8)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
85.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ib	9	1	
86.	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri II	12	1	
87.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri IIa	9	1	
88.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri IIb	9	0	
89.	Asdep Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan	15	1	
90.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan I	12	1	
91.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia	9	1	
92.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib	9	0	
93.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan II	12	1	
94.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Iia	9	1	
95.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Iib	9	1	
96.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan III	12	0	
97.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa	9	1	
98.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb	9	1	
99.	DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA LAIN	17	1	
100.	Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi	15	1	

18



Lampiran II (6/8)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
101.	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi I	12	1	
102.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ia	9	1	
103.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ib	9	1	
104.	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi II	12	1	
105.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Iia	9	1	
106.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Iib	9	1	
107.	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi III	12	1	
108.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIa	9	1	
109.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIb	9	1	
110.	Asdep Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain	15	1	
111.	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain I	12	1	
112.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ia	9	1	
113.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ib	9	0	
114.	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain II	12	1	
115.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Iia	9	1	
116.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Iib	9	0	
117.	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain III	12	1	
118.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIa	9	1	
119.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIb	9	1	
120.	Asdep Usaha Jasa Konstruksi	15	1	
121.	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi I	12	1	
122.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ia	9	1	
123.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ib	9	0	

*Handwritten signature*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II (7/8)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
124.	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi II	12	1	
125.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Iia	9	1	
126.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Iib	9	1	
127.	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi III	12	1	
128.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi IIIa	9	1	
129.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi IIIb	9	1	
130.	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS	17	1	
131.	Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN	15	1	
132.	Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMN	12	1	
133.	Kepala Subbidang Mutasi SDM Eksekutif BUMN	9	0	
134.	Kepala Subbidang Pengelola Data SDM Eksekutif BUMN	9	1	
135.	Kepala Bidang Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	12	1	
136.	Kepala Subbidang Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	9	1	
137.	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat SDM Eksekutif BUMN	9	1	
138.	Asdep Informasi dan Komunikasi Publik	15	1	
139.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12	1	
140.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan	9	1	
141.	Kepala Subbidang Pengoperasian dan Pemeliharaan	9	1	
142.	Kepala Bidang Analisis Data	12	1	
143.	Kepala Subbidang Riset	9	1	
144.	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	9	1	

15



Lampiran II (8/8)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
I	2	3	4	5
145.	Kepala Bidang Komunikasi Publik	12	0	
146.	Kepala Subbidang Publikasi dan Hubungan Media Massa	9	1	
147.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	9	1	
148.	Asdep Restrukturisasi BUMN	15	1	
149.	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN I	12	1	
150.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ia	9	1	
151.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ib	9	1	
152.	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN II	12	1	
153.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IIa	9	1	
154.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IIb	9	1	
155.	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN III	12	1	
156.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IIIa	9	1	
157.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IIIb	9	1	
<b>TOTAL</b>			<b>147</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**DAHLAN ISKAN**

1966070 199603 1 001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III (1/3)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Analisis Manajemen Kinerja	Sekretariat	7	4	
2.	Analisis Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	7	2	
3.	Analisis Organisasi	Sekretariat	7	2	
4.	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	2	
5.	Pengadministrasian Kepegawaian	Sekretariat	5	6	
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi	Sekretariat	7	3	
7.	Analisis Anggaran	Sekretariat	7	2	
8.	Analisis SDM Aparatur	Sekretariat	7	18	Termasuk pegawai dengan status tugas belajar dan penugasan menjadi Direksi BUMN/ Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan
9.	Analisis Keuangan	Sekretariat	7	0	
10.	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	2	
11.	Pengadministrasian Keuangan	Sekretariat	5	2	
12.	Analisis Hukum	Sekretariat	7	8	
13.	Pranata Kearsipan	Sekretariat	5	0	
14.	Arsiparis Muda	Sekretariat	9	0	

68



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III (2/3)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15.	Arsiparis Pertama	Sekretariat	8	0	
16.	Arsiparis Penyelia	Sekretariat	8	0	
17.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Sekretariat	7	0	
18.	Arsiparis Pelaksana	Sekretariat	6	0	
19.	Arsiparis Pemula	Sekretariat	5	0	
20.	Pustakawan Pertama	Sekretariat	8	0	
21.	Pengadministrasi Kearsipan	Sekretariat	5	1	
22.	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	13	
23.	Pengadministrasi Perpustakaan	Sekretariat	5	2	
24.	Sekretaris	Sekretariat	5	24	
25.	Analisis Kelembagaan	Sekretariat	7	0	
26.	Analisis Kerjasama	Sekretariat	7	0	
27.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pertama	Sekretariat	8	0	
28.	Pengelola BMN	Sekretariat	6	2	
29.	Pemelihara Barang	Sekretariat	5	5	
30.	Petugas Protokol	Sekretariat	5	2	
31.	Penyusun Bahan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	6	2	
32.	Pengadministrasi Barang dan Jasa	Sekretariat	5	0	
33.	Auditor Madya	Inspektorat	11	2	
34.	Auditor Muda	Inspektorat	9	2	
35.	Auditor Pertama	Inspektorat	8	0	
36.	Pemeriksa Anggaran	Inspektorat	5	7	
37.	Analisis Data BUMN	Deputi Teknis	7	29	

68



Lampiran III (3/3)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
38.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Deputi Teknis	7	1	
39.	Analisis Diklat	Deputi Teknis	7	0	
40.	Analisis Informatika	Deputi Teknis	7	3	
41.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Deputi Teknis	7	1	
42.	Analisis Hasil Penelitian	Deputi Teknis	7	1	
43.	Pengelola Data Statistik	Deputi Teknis	6	1	
44.	Analisis Informasi	Deputi Teknis	7	0	
45.	Pranata Humas Pertama	Deputi Teknis	8	0	
46.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Deputi Teknis	6	1	
47.	Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar BUMN	Staf Ahli	16	1	
48.	Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	16	1	
<b>TOTAL</b>				<b>152</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

DAHLAN ISKAN



199603 1 001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyetiaan & (1-3)	Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)				
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)						
1	MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA													
2	WAKIL MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA													
3	SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN	4205	17	5	3	3	4	100	4	125	4	505	6	1325
4	Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi	3430	15	4	2	2	3	75	2	75	4	505	3	975
5	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	2280	12	1	1	1	2	75	2	75	4	505	2	575
6	Kepala Subbagian Perencanaan	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
8	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
9	Kepala Subbagian Layanan SDM	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Manajemen Jabatan Fungsional	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
11	Kepala Subbagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
12	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
14	Kepala Biro Hukum	3265	15	4	2	2	3	75	2	75	3	340	3	975
15	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
16	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
17	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
18	Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
19	Kepala Bagian Pelayanan Hukum I	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
20	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
21	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
22	Kepala Bagian Pelayanan Hukum II	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
23	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ila	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
24	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Ib	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
25	Kepala Bagian Bantuan Hukum	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
26	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
27	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310
28	Kepala Biro Umum	3430	15	4	2	2	3	75	2	75	4	505	3	975
29	Kepala Bagian Administrasi	2115	12	1	1	2	2	75	2	75	3	340	2	575
30	Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip	1455	9	1	1	1	1	50	1	30	3	340	1	310

15





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelenggaraan & Penyediaan	Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)							
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)									
31	Kepala Subbagian Perustakaan dan Dokumentasi	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
32	Kepala Subbagian TU Pimpinan	1320	8	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
33	Kepala Bagian Perencanaan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
34	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelola Barang Milik Negara	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
35	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	1320	8	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
36	Kepala Subbagian Pengadaan	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
37	Inspektur	3350	15	3	550	2	250	2	775	3	75	2	75	5	650	3	975
38	Kepala Sub Bagian TU	1320	8	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
39	DEPUTI BIDANG USAHA AGRO DAN INDUSTRI STRATEGIS	4105	17	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	4	605	6	1225
40	Asdep Usaha Perkebunan dan Kehutanan	3430	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	4	505	3	975
41	Kepala Bidang Usaha Perkebunan I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
42	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
43	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
44	Kepala Bidang Usaha Perkebunan II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
45	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
46	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
47	Kepala Bidang Usaha Kehutanan	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
48	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
49	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
50	Asdep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri	3265	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975
51	Kepala Bidang Usaha Pertanian dan Perikanan	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
52	Kepala Subbidang Usaha Pertanian	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
53	Kepala Subbidang Usaha Perikanan	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
54	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
55	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
56	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
57	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
58	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
59	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
60	Asdep Usaha Industri Strategis	3265	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975

B



Lampiran IV (3/6)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Hubungan	Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)							
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)		3	2	1	2				
61	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
62	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
63	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
64	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
65	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
66	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis I Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
67	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIa	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
68	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
69	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIb	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
70	<b>DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, DAN PERHUBUNGAN</b>	<b>4105</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>900</b>	<b>3</b>	<b>350</b>	<b>3</b>	<b>900</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>505</b>	<b>5</b>	<b>1225</b>
71	<b>Asdep Usaha Energi, Pertambangan, Perencanaan dan Pariwisata</b>	<b>3430</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>775</b>	<b>2</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>775</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>505</b>	<b>3</b>	<b>975</b>
72	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
73	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
74	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
75	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
76	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
77	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan I Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
78	Kepala Bidang Usaha Perencanaan dan Pariwisata	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
79	Kepala Subbidang Usaha Perencanaan	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
80	Kepala Subbidang Usaha Pariwisata dan Perhotelan	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
81	<b>Asdep Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri</b>	<b>3265</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>775</b>	<b>2</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>775</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>340</b>	<b>3</b>	<b>975</b>
82	Kepala Bidang Usaha Perdagangan	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
83	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan I	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
84	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan II	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
85	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
86	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
87	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
88	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
89	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
90	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri I Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran IV (4/6)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelesaian & (1-4)	Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)					
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)		Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Lain (1-6)				
91	Asdep Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan	3265	15	4	775	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975
92	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan I	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
93	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
94	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
95	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan II	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
96	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
97	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ilb	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
98	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan III	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
99	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
100	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
101	DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA KONSTRUKSI DAN	4105	17	5	900	3	350	4	100	4	125	4	505	5	1225
102	Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi	3430	15	4	775	2	250	3	75	2	75	4	505	3	975
103	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi I	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
104	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
105	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
106	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi II	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
107	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
108	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ilb	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
109	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi III	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
110	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
111	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIb	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
112	Asdep Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain	3265	15	4	775	2	250	3	75	2	75	3	340	3	975
113	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain I	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
114	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
115	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
116	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain II	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
117	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
118	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ilb	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310
119	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain III	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
120	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	3	340	1	310

K



Lampiran IV (5/6)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Penyelesaian	Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)					
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)							
121	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ilib	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
122	<b>Asdep Usaha Jasa Konstruksi</b>	<b>3265</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>775</b>	<b>2</b>	<b>775</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>340</b>	<b>3</b>	<b>975</b>
123	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi I	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
124	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ia	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
125	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ib	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
126	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi II	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
127	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ila	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
128	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ilib	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
129	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi III	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
130	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi IIIa	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
131	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi IIIb	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
132	<b>DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS</b>	<b>4105</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>900</b>	<b>3</b>	<b>900</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>505</b>	<b>5</b>	<b>1225</b>
133	<b>Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN</b>	<b>3430</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>775</b>	<b>2</b>	<b>775</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>505</b>	<b>3</b>	<b>975</b>
134	Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMN	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
135	Kepala Subbidang Mutasi SDM Eksekutif BUMN	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
136	Kepala Subbidang Pengelola Data SDM Eksekutif BUMN	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
137	Kepala Bidang Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
138	Kepala Subbidang Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
139	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat SDM Eksekutif BUMN	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
140	<b>Asdep Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>3430</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>775</b>	<b>2</b>	<b>775</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>505</b>	<b>3</b>	<b>975</b>
141	Kepala Bidang Sistem Informasi	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
142	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
143	Kepala Subbidang Pengoperasian dan Pemeliharaan	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
144	Kepala Bidang Analisis Data	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
145	Kepala Subbidang Riset	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
146	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
147	Kepala Bidang Komunikasi Publik	2115	12	1	175	1	775	3	75	2	75	3	340	2	575
148	Kepala Subbidang Publikasi dan Hubungan Media Massa	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
149	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	1455	9	1	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
150	<b>Asdep Restrukturisasi BUMN</b>	<b>3265</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>775</b>	<b>2</b>	<b>775</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>340</b>	<b>3</b>	<b>975</b>

BS



Lampiran IV (6/6)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & (1-4)	Faktor 4 Hubungan (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)					
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)		Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Lain (1-6)				
151	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN I	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
152	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	2	340	1	310
153	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	2	340	1	310
154	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN II	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
155	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	2	340	1	310
156	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ilb	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	2	340	1	310
157	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN III	2115	12	1	175	1	100	2	775	2	75	3	340	2	575
158	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IliA	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	2	340	1	310
159	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IliB	1455	9	1	175	1	100	1	450	1	30	2	340	1	310

Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



NIP. 1963010 199603 1 001

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d.

DAHLAN ISKAN



Lampiran V (1/2)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Harga Jabatan	Kelas Jabatan	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	Analisis Manajemen Kinerja	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
2	Analisis Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
3	Analisis Organisasi	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
4	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
5	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	490	5	3	350	1	25	1	25	1	10	1	5
6	Analisis Pengembangan Kompetensi	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
7	Analisis Anggaran	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
8	Analisis SDM Aparatur	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
9	Analisis Keuangan	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
10	Verifikator Keuangan	Sekretariat	790	6	4	550	1	25	1	25	1	10	1	5
11	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
12	Analisis Hukum	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
13	Pranata Kearsipan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
14	Arsiparis Muda	Sekretariat	1355	9	5	750	2	125	3	150	2	25	1	5
15	Arsiparis Pertama	Sekretariat	1280	8	5	750	2	125	3	150	2	25	1	5
16	Arsiparis Penyelia	Sekretariat	1205	8	5	750	2	125	2	75	2	25	1	5
17	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Sekretariat	1040	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
18	Arsiparis Pelaksana	Sekretariat	790	6	4	550	1	25	1	25	1	10	1	5
19	Arsiparis Pemula	Sekretariat	490	5	3	350	1	25	1	25	1	10	1	5
20	Pustakawan Pertama	Sekretariat	1280	8	5	750	2	125	3	150	2	25	1	5
21	Pengadministrasi Kearsipan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
22	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
23	Pengadministrasi Perpustakaan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
24	Sekretaris	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
25	Analisis Kelembagaan	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
26	Analisis Kerjasama	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	5
27	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretariat	1280	8	5	750	2	125	3	150	2	25	1	5
28	Pengelola BMN	Sekretariat	840	6	4	550	2	125	2	75	1	10	1	5
29	Pemelihara Barang	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5
30	Petugas Protokol	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5

69



Lampiran V (2/2)  
Peraturan Menteri BUMN  
Nomor : PER-16/MBU/10/2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FACTOR 2 Penguasaan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
									1	2		1	2	1	2
31	Penyusun Bahan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	6	4	125	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
32	Pengadministrasi Barang dan Jasa	Sekretariat	5	3	125	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
33	Auditor Madya	Inspektorat	11	6	275	3	150	3	150	2	25	1	5	1	5
34	Auditor Muda	Inspektorat	9	5	125	2	125	3	150	2	25	1	5	1	5
35	Auditor Pertama	Inspektorat	8	5	125	2	125	3	150	2	25	1	5	1	5
36	Pemeriksa Anggaran	Inspektorat	5	3	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
37	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
38	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
39	Analisis Diklat	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
40	Analisis Informatika	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
41	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
42	Analisis Hasil Penelitian	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
43	Pengelola Data Statistik	Deputi Teknis	6	3	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
44	Analisis Informasi	Deputi Teknis	7	5	125	2	125	1	25	1	10	1	5	1	5
45	Pramata Humas Pertama	Deputi Teknis	8	5	125	2	125	1	25	2	25	1	5	1	5
46	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Deputi Teknis	6	3	125	2	125	3	150	2	25	1	5	1	5
47	Staff Ahli Bidang Tata Kelola dan Sineergi Antar BUMN	Staff Ahli	16	8	650	5	650	6	450	3	60	1	5	1	5
48	Staff Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga	Staff Ahli	16	8	650	5	650	6	450	3	60	1	5	1	5

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



NIP. 19681010 199603 1 001

**MENTERI**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d.

**DAHLAN ISKAN**